ANALISIS TANTANGAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN DIGITALISASI DESA

Tobby Putra Kusuma[1)], Asep Nurjaman[2)], Salahudin[3)], Sitna Hajar Malawat[4)]

[1)2) 3)] FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
[4)] FISIP Universitas Islam Kalimantan MAB
Email: tobbykusuma096@gmail.com, Asep.nur8@gmail.com, Salahudin.76@gmail.com sitna.shm@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the challenges and potentials in developing village digitization based on the potential and direct analysis. The research method applied in this study is a qualitative analysis method of challenges and potentials in the development of village digitization. Data analysis using the Nvivo 12 Plus application. The results of the study reveal several potential forms of developing village digitization that are processed into images, namely Central Government Support, Human Resources, Village Programs, Community Participation, and Village Autonomy. Then the challenges in developing village digitization are Regulation, Realization, Participation, Bureaucracy, Culture, and Geographical Location. This village digitization program will provide benefits in optimizing an effective and efficient village government system. In addition, village digitization can increase the potential for improving employee services. This research is expected to contribute to the development of systems, information services, and administrative services in rural areas. In addition, this research is expected to contribute to government policy decisions, especially in village government in technological developments. So that in the process of developing village digitization, it can realize an open and clean government system.

Keywords: Village Digitization, Information Technology, Government

PENDAHULUAN

Penggunaan sistem informasi untuk membantu kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih mudah. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi informasi, telah memungkinkan pengembangan sistem informasi yang semakin handal. Penataan informasi yang dilakukan secara teratur, jelas, tepat dan cepat serta dapat disajikan dalam aplikasi dan laporan tentunya sangat mendukung kelancaran kegiatan operasional pemerintah desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan mewujudkan digitalisasi desa, pemerintah desa bisa berinteraksi dan bertukar informasi dengan warga, sehingga mampu memperlancar jalannya pemerintah desa didalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat (Paryanta et al., 2017). Sebagian besar desa di Indonesia dalam pencatatan data kependudukan masih manual atau menggunakan Microsoft Excel. Tidak ada pelayanan untuk menginformasikan data kependudukan kepada masyarakat, sehingga untuk mengetahui informasi ini masyarakat diharuskan meluangkan waktu untuk datang kekantor desa. Keadaan seperti ini tentu saja membuang waktu masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi untuk kependudukan berbasis web sehingga mampu memberikan pelayanan dan informasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat (Ardhana, 2019).

Sistem informasi ini menjadi bagian penting dalam digitalisasi desa yang bertujuan

untuk menyajikan informasi administrasi kependudukan secara cepat dan akurat. Sistem ini membantu mengatasi permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan mempermudah dalam pengolahan data kependudukan. Selain itu, sistem ini menggunakan pengolahan database sehingga pengolahan data menjadi terorganisasi dalam satu tempat penyimpanan (Widyawati, 2016).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat kegiatan digitalisasi berkaitan erat dengan proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elektronik melalui media komputer, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat. Setiap informasi dapat dengan relatif mudah dan cepat untuk disimpan serta ditransfer ke berbagai tempat di belahan dunia (Wijaya et al., 2013). Kegiatan digitalisasi desa dilakukan dengan tahapan survey atau inventarisasi kondisi digitalisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, perangkat desa, perumusan masalah, dan upaya pemecahan masalah. Karena desa merupakan sumber data paling akurat untuk pemcarian data kependudukan. Untuk itu cara pengumpulan data penduduk, pengisian data dalam format, pengolahan data hingga penyajian informasi data kependudukan kepada masyarakat harus dilakukan secara efisien dan efektif agar informasi yang tersampaikan dapat dengan cepat dan akurat.

Banyak penelitian yang sudah menjelaskan tentang program digitalisasi desa. Salah satumya Widyawati dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang semakin modern dan laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin tinggi menuntut adanya sistem teknologi informasi kependudukan yang lebih canggih. Sehingga sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah dalam pencarian dan pengolahan informasi data kependudukan secara akurat dan efisien. Selain itu, dengan menggunakan pengolahan database maka pengolahan data menjadi terorganisasi dalam satu tempat penyimpanan sehingga memudahkan pihak desa atau keluharan dalam pengoperasiannya dan memperkecil kesalahan yang mungkin terjadi serta memudahkan dalam pembuatan laporan kependudukan. Dengan adanya permasalahan tersebut dan agar dapat menghemat waktu dan tenaga, maka perlu adanya aplikasi kependudukan tingkat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi petugas desa dan dapat mempermudah dalam pencarian dan pengolahan informasi data kependudukan secara akurat dan efisien serta dapat mempermudah petugas desa dalam pengumpulan data penduduk desa dan mempermudah melayani penduduk desa (Widyawati, 2016)

Fokus kajian penelitian ini mengarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana analisis potensi dan tantangan dalam mewujudkan program digitalisasi desa menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan keberlangsungan pelayanan publik yang lebih optimal serta meningkatkan produktifitas daerah. Hasil dari upaya tersebut diharapkan mampu memenuhi peningkatan pelayanan pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif analisis dengan Software Analisis Data NVivo 12 Plus. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teknologi, khususnya ilmu pemerintahan dan administrasi publik yang terkait dengan upaya pemecahan masalah dan hambatan dalam mewujudkan kawasan permukiman desa yang inovatif desa di masa kini yang mampu berkembang dan berinovasi dalam pengentasan masalah-masalah yang ada di desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Digitalisasi

Di era revolusi keempat yang dikenal dengan revolusi digital, semua informasi dapat diperoleh dengan real-time dan cepat dimana saja dan kapan saja. Adanya mesin pencari membantu seseorang mencari bahan rujukan yang diinginkannya secara cepat dengan pembiayaan rendah. Hal ini karena bahan ajar dan aktvitas interaksi telah terdigitalisasi oleh kemajuan teknologi Perkembangan teknologi informasi menjadi bagian dari munculnya era revolusi digital di Indonesia. Perkembangannya yang sangat pesat mampu memberikan pengaruh besar dan mendominasi seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk di dunia pendidikan (Setyaningsih et al., 2019)

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis sistem yang sedang berjalan tersebut adalah dengan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kependudukan diantaranya sistem pendaftaran penduduk, dan system pengolahan informasi kependudukan (Widyawati, 2016).

Pemanfaatan teknologi informasi (E-Gov) dalam tata kelola pemerintahan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempercepat intraksi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat (Iskandar, 2021). Upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa yakni menjadikan desa menjadi desa digital. Hal ini sejalan dengan konsep desa pintar yang muncul didasari dari adopsi teknologi informasi untuk mengintegrasikan potensi dan sistem kelembagaan desa, agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat pedesaan (Somwanshi et al., 2016). Melalui konsep desa digital diharapkan dapat mencipatkan desa pintar yang memanfaatkan teknologi sebagai katalisator pembangunan, pendidikan, peluang bisnis lokal, peningkatan dan kesejahteraan seluruh penduduk pedesaan (Ranade et al., 2015)

Terdapat beberapa dampak negatif yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi khususnya internet, namun di sisi lain, dampak positif dari teknologi informasi ini juga tidak bisa disepelekan. Hal itu tentunya berhubungan erat dengan sifat dari teknologi informasi yang mengusung keterbukaan sehingga informasi dalam bentuk apapun, sebanyak apapun jumlahnya, dalam waktu yang singkat dapat dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia (prinsip many-to-many dan one-tomany) (Wijaya et al., 2013) Desa digital merupakan desa yang memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desanya. Dengan terwujudnya menjadi desa digital diharapkan kualitas pelayanan publik di desa Pematang Jering menjadi lebih baik (Alvaro & Octavia, 2019)

Perubahan pandangan tentang desa ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat desa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah desa dituntut untuk inovatif dalam pengelolaan pemerintahan desanya. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa adalah dengan memanpaatkan teknologi

informasi dalam melakukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan teknologi infromasi saat ini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat desa dan memiliki pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarkat saat ini (Ekasari & Hadi Dharmawan, 2012)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif analisis konten dengan software Nvivo 12 plus. Peneliti menggunakan software Nvivo untuk membantu analisis data. Nvivo merupakan software yang digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data kualitatif, seperti gambar, diagram, audio, halaman web, dan sumber dokumen lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji sebuah artikel yang memiliki keterkaitan dengan potensi dan tantangan pengembangan digitalisasi desa. Sumber data yang didapat ialah berupa kumpulan artikel-artikel yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan artikel dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Teknik analisis di dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan Nvivo 12 Plus for windows.

Langkah pertama peneliti proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari data-data yang sesuai dengan kriteria yang peneliti inginkan melalui website yang kemudian disimpan dan didownload menggunakan fitur yang ada di software Nvivo 12 plus berupa Ncapture untuk mempermudah mendownload artikel yang ada di website tersebut. Kemudian disimpan di dalam software NVivo 12 plus menggunakan fitur download yang menggunakan Ncapture sebelumnya pada website. Selanjutnya melakukan pengkodean dari hasil kajian literatur yang digunakan (nodes) sesuai dengan potensi maupun tantangan pengembangan pariwisata desa. Langkah kedua untuk penkodean hasil analisis (cases). Tingkat kepercayaan suatu penelitian kualitatif dapat diukur dengan kriteria, yakni credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Selain itu untuk lebih meyakinkan tingkat kepercayaan tersebut dengan menggunakan bantuan aplikasi Nvivo 12 Plus for windows. Validitas yang tinggi pula dapat tercapai dengan menggunakan NVivo. Lebih lanjut lagi, untuk membantu validitas penelitian kualitatif, NVivo memberi ruang seluas-luasnya untuk tim peneliti untuk bekerja dalam NVivo. Dengan demikian NVivo efektif untuk triangulasi data dan triangulasi peneliti NVivo, sehingga dapat membantu kita dalam menghasilkan suatu penelitian kualitatif yang reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model dari program yang berkelanjutan digitalisasi desa di Indonesia tentunya akan berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Hal tersebut dikarenakan antara desa dengan desa lainnya memiliki potensi sumber daya manusia dan keadaan sosial yang berbeda. Melalui konsep desa digital diharapkan dapat menciptakan desa pintar yang memanfaatkan teknologi sebagai katalisator pembangunan, pendidikan, peluang bisnis lokal, peningkatan dan kesejahteraan seluruh penduduk pedesaan (Ranade et al., 2015). Namun demikian secara umum model pengembangan digital pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Elemen-elemen yang terdiri dari sumber daya manusia yang produktif, ternaga kerja pemerintah desa harus terhubung

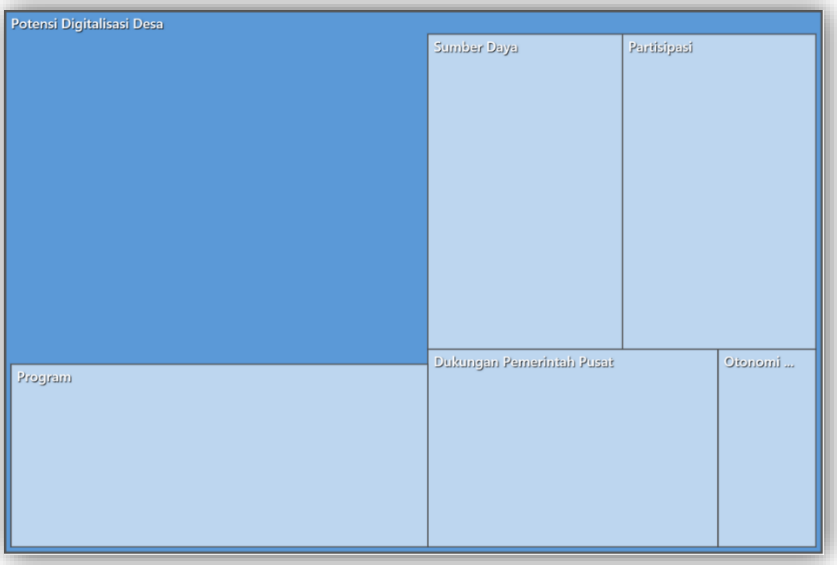
dan mampu untuk memberdayakan teknologi digital;
2. Untuk meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi digital dari seluruh elemen-elemen pemerintah sampai pemerintah desa, maka diperlukan kolaborasi dari agent of change ataupun praktisi, pemerintah setempat dan akademisi untuk mensosialisasikan bagaimana menggunakan teknologi digital yang tepat guna;
3. Baiknya kinerja dari aparatur desa yang produktif di desa tersebut, membuka peluang keberhasilan program digitalisasi desa;
4. Aparatur pemerintah desa dan para investor yang kolaboratif dan sinergis diantara masyarakat yang terhubung dengan teknlogi digital akan berkontribusi suksesnya program digitalisasi desa sehingga kesejahteraan masyarakat di desa tersebut juga meningkat.
5. Hasil dari penggunaan teknologi digital yang tepat guna, akan meningkatkan pelayanan administrative dan birokrasi pemerintahan desa, meningkatkan reputasi desa, meningkatkan produktivitas aparatur desa, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarkat.

Implementasi program yang fokus terhadap perkembangan teknologi tentunya akan terdapat kekurangan dan kelebihannya. Pemanfaatan teknologi informasi (E-Gov) dalam tata kelola pemerintahan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempercepat intraksi antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan cepat (Iskandar, 2021). Termasuk digitalisasi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk desa secara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Adapun kekurangannya adalah:

1. Terjadinya kriminalitas berbasiskan digital;
2. Timbulnya permasalahan sosial yang diakibatkan oleh penggunaan teknolog digital yang tidak tepat sasaran;
3. Besarnya biaya investasi untuk pengadaan infrastruktur dari teknologi digital, apabila tidak digunakan secara optimal.

Selain itu kelebihan dari program digitalisasi pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi masyrakat desa untuk menggunakan teknologi digital yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa;
3. Menngkatnya kemampuan usaha lokal pedesaan untuk meningkatkan reputasi dan juga keuangannya sehingga mampu bersaing dengan pebisnis tingkat nasional.



Gambar 1. Potensi Digitalisasi Desa

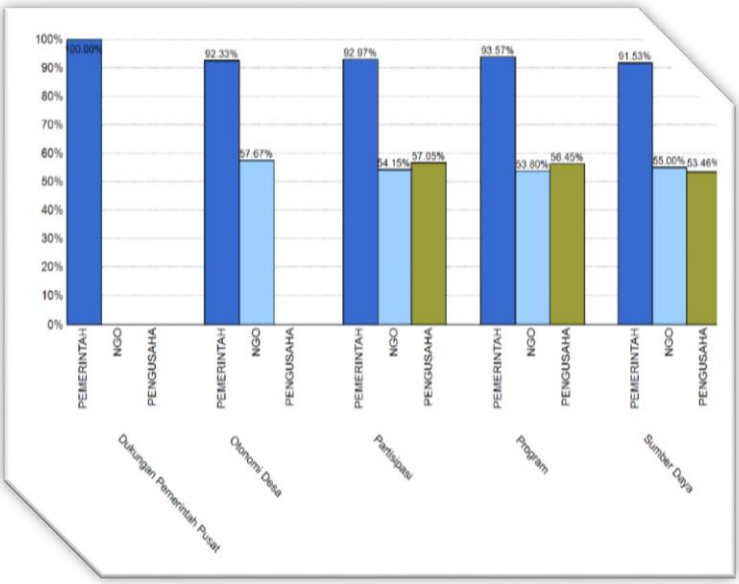
Berdasarkan Gambar 1 potensi pengembangan digitalisasi desa bagian pertama yaitu sumber daya, perubahan-perubahan global yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi telah mengubah aspek-aspek kehidupan manusia sehingga membutuhkan penyesuaian dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap memanfaatkan digitalisasi di era digital ini. Dua fokus utama dalam menyiapkan SDM ini adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang sudah memasuki pasar kerja dan menyiapkan calon tenaga kerja yang saat ini masih di bangku sekolah, demi keberhasilan pengembangan digitalisasi desa. Bagian kedua yaitu partispasi, digitalisasi desa merupakan suatu pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet.

Tujuannya adalah mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan informasi. Targetnya seluruh pelayanan publik di desa akan beralih dalam model digitalisasi. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi pada masyarakat perdesaan mampu pula menumbuhkan partisipasi. Baik partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi pengambilan pemanfaatan mapun partisipasi dalam evaluasi. Bagian ketiga yaitu program, Melalui program digitalisasi desa tersebut pelayanan publik yang dianggap berbelit dan lama menjadi ringkas dan cepat. Karena segala pelayanan terkoneksi melalui jaringan. Masyarakat mendapa kemudahan dari mengurus Kartu Keluarga, KTP maupun pelayanan lainnya. Dampaknya suasana desa menjadi begitu dinamis. Lalu lintas informasi yang selama ini terisolasi akan mulai terbuka.

Komunikasi yang selama ini hanya lingkup masyarakat setempat akan menembus jauh ke luar batas wilayah. Beberapa aktivitas ekonomi pun menggunakan teknologi digital sehingga lebih efektif dan efisien. Bagian keempat yaitu Dukungan Pemerintah Pusat, Komitmen pemerintah membangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di berbagai daerah tersebut, menjadi titik awal pembaharuan pelayanan publik. Tujuannya mewujudkan azas adil dan merata dalam pelayanan telekomunikasi,

mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal serta meningkatkan produktifitas daerah. Hal ini dikarenakan teknologi infromasi saat ini sudah dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat desa dan memiliki pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarkat saat ini (Ekasari & Hadi Dharmawan, 2012).

Melihat pada arah kebijakan pemerintah tersebut perluasan teknologi digital di pedesaan, sepatutnya memberikan perubahan yang lebih baik. Terutama pada peningkatan pelayanan pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal itu sangat memungkinkan terlebih pemanfaatan teknologi digital di masyarakat desa juga cukup massif. Bagian kelima yaitu otonomi desa, Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dipertegas oleh PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Terbitnya Peraturan Perundang-undangan tentang desa tersebut melahirkan kebijakan tentang desa untuk mampu dengan leluasa mengurus rumah tangganya sendiri (desa otonom), mengakibatkan peningkatan yang signifikan pada pengembangan inovasi desa Di masa kini desa dianggap mampu berkembang dan berinovasi dalam pengentasan masalah-masalah yang ada di desa. Desa didorong untuk maju dan mandiri, dengan harapan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya untuk kemajuan pembangunan desanya.



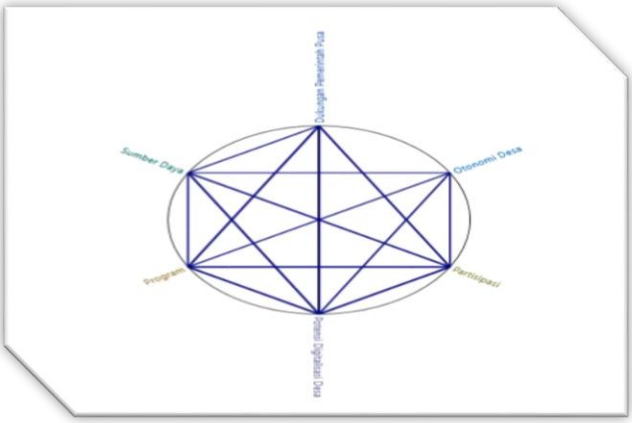
Gambar 2. Keterlibatan Aktor Dalam Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa

Berdasarkan Gambar 2 terdapat aktor yang terlibat dalam Pengembangan Digitalisasi Desa yaitu Pemerintah, NGO (Non- Governmental Organization), dan Pengusaha. Bagian pertama adalah Dukungan Pemerintah Pusat, yaitu Pemerintah dengan presentase keterlibatan 100%.

Pemerintah sebagai pemegang kendali kebijakan yang memperluas pembangunan infrastruktur teknologi digital di pedesaan, merupakan wujud keyakinan pemerintah bahwa teknologi digital menjadi instrument yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Bagian kedua adalah potensi pengembangan

digitalisasi desa berdasarkan Otonomi Desa dengan angka keterlibatan dari pemerintah 92%. Disini terlihat presentase keterlibatan pemerintah dalam otonomi desa tidak mencapai 100% karena memang pemerintah sendiri masih ingin melihat perkembangan jangka panjang Digitalisasi Desa, melihat perhatian pembangunan di Indonesia memang masih perlu diarahkan dengan berorientasi pada pembangunan digitalisasi desa, karena sebagian wilayah Indonesia meliputi wilayah perdesaan selama ini sumber daya yang ada di desa diambil sehingga menimbulkan arus urbanisasi dari desa ke kota, kemiskinan, keterbelakangan menjadi hal yang selalu melekat di desa.

Selanjutnya keterlibatan NGO dalam mendukung potensi pengembangan digitalisasi desa berdasarkan otonomi desa menunjukan angka presentase 57%. Bagian ketiga adalah potensi yang terdapat dalam partisipasi Desa dengan angka keterlibatan dari pemerintah 92%. Hal ini hanya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam mendukung pengembangan digitalisasi desa. Selanjutnya keterlibatan NGO dalam mendukung potensi pengembangan digitalisasi desa menunjukkan angka presentase 54%, karena bagi NGO pemerintahlah yang berkewajiban mensukseskan pengembnagan digitalisasi desa dan selebihnya partisipasi dari masyarakat. Lalu kemudian potensi adanya keterlibatan pengusaha dalam menyiapkan dukungan berupa sarana prasarana dan sebuah sistem oprasional berupa aplikasi untuk berjalannya mekanisme digital yang menunjukan presentase dukungan sebesar 57%. Bagian keempat adalah potensi program yang telah dijalankan dengan angka keterlibatan dari pemerintah 93%. Selanjutnya NGO dengan berbagai saran dan masukan untuk pemerintah dalam mensukseskan program digitalisasi desa dengan presentase dukungan 53%. Lalu keterlibatan pengusaha karena untuk terlaksananya program membutuhkan pihak swasta yaitu pengusaha selain pemerintah. Bagian kelima adalah sumber daya, potensi sumber daya yang dukung oleh keterlibatan pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja ahli dalam bidang digital dengan prsentase 91%. Lalu NGO yang memberikan berbagai pendapat yang dikemukakan dengan presentase dukungan 59%. Yang terakhir pengusaha yang juga turut mendukung dengan membantu pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja ahli dengan presentase dukungan 53%.



Gambar 3. Korelasi keterkaitan antar potensi

Tabel 1. Data Koefisien Korelasi Yang Kuat Antar Potensi

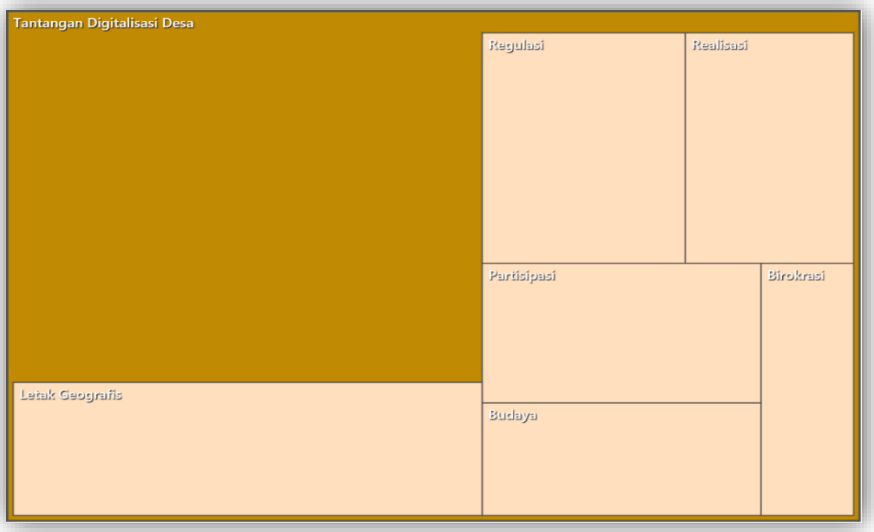
Korelasi Keterkaitan Kuat		Angka Korelasi
Program	Partisipasi	0,922364
Program	Dukungan Pemerintah Pusat	0,900093
Sumber Daya	Partisipasi	0,869116
Sumber Daya	Dukungan Pemerintah Pusat	0,855164

Hasil analisis korelasi keterkaitan kuat antar potensi pengembangan digitalisasi desa yang paling tinggi memiliki keterkaitan kuat yaitu program dan partisipasi, dengan angka korelasi 0,92. Hal ini dikarenakan setiap program pemerintah yang direncanakan memerlukan partisipasi dari semua lini masyarakat maupun tenaga kerja pemerintah dan aparatur desa. Dengan demikian masyarakat dan aparatur desa berkomitmen menggunakan teknologi informasi sebagai ruang memberikan dan mendapatkan pelayanan. Keterkaitan program dan dukungan pemerintah pusat juga mendapat nilai korelasi tinggi sebesar 0,90 hal ini di karenakan pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur setiap daerah nya masing-masing. dan sebuah program tentu saling keterkaitan kuat dengan pemerintah pusat.

Tabel 2. Data Koefisien Korelasi Yang Lemah Antar Potensi

Korelasi Keterkaitan Lemah		Angka Korelasi
Sumber Daya	Otonomi Desa	0,701792
Sumber Daya	Program	0,665243
Otonomi Desa	Partisipasi	0,648061
Otonomi Desa	Program	0,612068
Dukungan Pemerintah Pusat	Partisipasi	0,555214

Hasil analisis korelasi keterkaitan lemah antar potensi pengembangan digitalisasi desa yang paling rendah yaitu dukungan pemerintah pusat dan partisipasi dengan presentase angka korelasi 0,55. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat hanya berperan dan berpartisipasi dalam membuat dan menentukan arah sebuah kebijakan dalam hal ini adalah pengembangan digitalisasi desa, yang kemudian berpengaruh pada kewenangan otonomi desa dalam menentukan atau membuat program. Dan ini ditunjukan dengan adanya presentase angka korelasi yang sedikit lebih tinggin yaitu 0,61.



Gambar 4. Tantangan desa sehat dan sejahtera

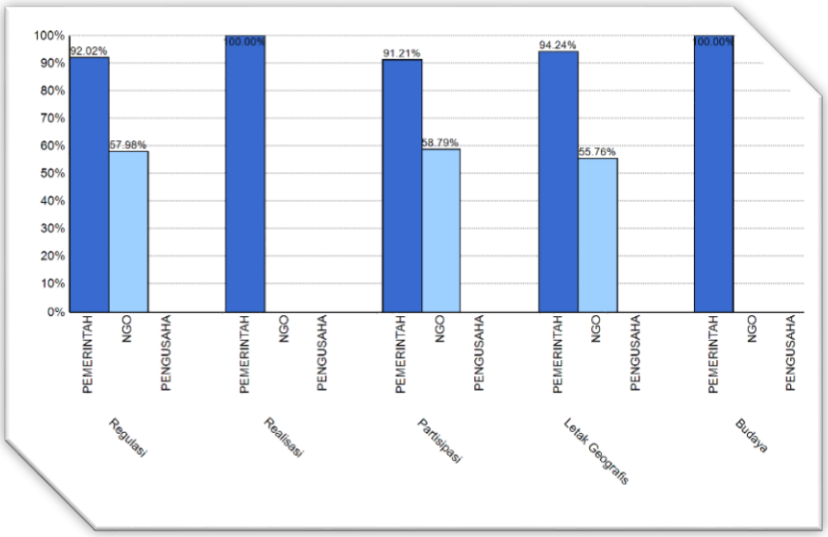
Berdasarkan Gambar 4 tantangan pengembangan digitalisasi desa bagian pertama yaitu letak geografis, negara Indonesia berbentuk kepulauan dengan jumlah pulau lebih 13.000 pulau dengan sebagian topografi wilayah berbentuk pengunungan dan lembah sehingga lokasi pedesaan menyebar yang mengakibatkan pembangunan sarana komunikasi dan informasi yang menjadi faktor penting dalam pengembangan digitalisasi desa pun cukup sulit dilakukan serta perlu dukungan biaya yang tidak murah. Akibatnya infrastruktur digital hanya terpusat di wilayah perkotaan itupun mayoritas ada di pulau Jawa dan Sumatera. Pada akhirnya ketidakmerataan infrastuktur digital ini menimbulkan kesenjangan digital. Bagian kedua regulasi tantangan pengembangan digitalisasi desa, pemerintah diharapkan segera menuntaskan regulasi untuk industri digital dan mengakselerasi pembangunan infrastrukturnya.

Desa digital merupakan desa yang memanfaatkan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan desanya. Dengan terwujudnya menjadi desa digital diharapkan kualitas pelayanan publik di desa Pematang Jering menjadi lebih baik (Alvaro & Octavia, 2019)

Hal ini dibutuhkan untuk mendorong kehadiran berbagai investor dari kalangan pengusaha, untuk pengembangan digitalisasi desa. Bagian ketiga realisasi digitalisasi desa, pemerintah selama ini kurang memperhatikan kondisi karakteristik desa-desa terkait dan yang lebih penting pemerintah harus juga memperhatikan kinerja desa yang ingin merealisasikan digitalisasi desa terkait teknis maupun non teknis Bagian keempat partisipasi, partisipasi masyarakat yang diharapkan meningkat sejalan dengan pemanfaatan teknologi inforamsi, justru menjadi kontra produktif.

Masyarakat akan mengabaikan pemanfaatan teknologi inforamsi dengan alasan ketidak mampuan menggunakannya, sehingga lebih memilih penggunaan layanan secara konvensional. Perkembangannya yang sangat pesat mampu memberikan pengaruh besar dan mendominasi seluruh sektor kehidupan masyarakat, termasuk di dunia pendidikan (Setyaningsih et al., 2019)

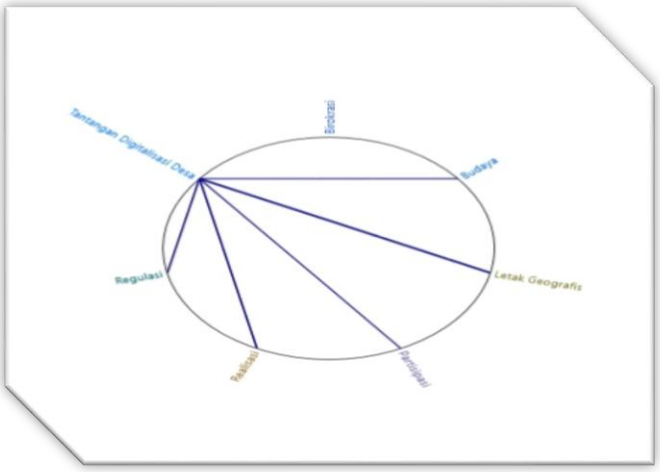
Bagian kelima budaya, pengembangan teknologi informasi yang tidak berorientasi pada kebutuhan secara langsung akan mengurangi kebermanfaatan. Karena pengguna yang tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi sesuai kebutuhan, akan semakin memperkokoh budaya apatis terhadap kemajuan teknologi informasi. Bagian keenam birokrasi, Kesiapan aparatur desa dengan hadirnya teknologi informasi juga perlu diperkuat. Aparatur desa perlu sadar tentang pemanfaatan teknologi informasi. Sekaligus mengubah pola kerjanya serta pelayanannya yang dulunya berbasis konvesional menjadi berbasis digital. Pergeseran ini perlu proses yang dibangun secara sistemik dengan upaya berkelanjutan. Melalui program tersebut pelayanan publik yang dianggap berbelit dan lama menjadi ringkas dan cepat. Karena segala pelayanan terkoneksi melalui jaringan. Namun masyarakat harus mendapatkan jaminan kemudahan dari mengurus Kartu Keluarga, KTP maupun pelayanan lainnya. Dampaknya suasana desa menjadi begitu dinamis.



Gambar 5. Keterlibatan aktor terhadap tantangan digitalisasi desa

Berdasarkan Gambar 5 terdapat aktor yang terlibat dalam Pengembangan Digitalisasi Desa yaitu Pemerintah, NGO (Non- Governmental Organization), dan Pengusaha. Bagian pertama adalah regulasi, terlihat pemerintah yang paling dominan, beratikan tantangan pengembangan digitalisasi desa terhambat karena pemerintah itu sendiri. Dalam tantangan regulasi pemerintah memiliki keterlibatan dengan presentas 92%. Tantangan regulasi memiliki kendala di tiap pemerintahan baik pusat maupun desa dan juga kurangnya kinerja NGO dalam mengkampanyekan digitalisasi desa dengan presentase 57%. Bagian kedua adalah realisasi, disini dapat dilihat angka presentase yang mencapi 100%, hal ini menjeleskan begitujelas tentang kurangnya keseriusan dalam merealisasikan digitalisasi desa. Bagian ketiga adalah partisipasi, kurangnya partipasi dari dari semua sektor pemerintah menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi pemerintah itu sendiri, karena kurangnya minat tenaga kerja pemerintah dapat menghambat sebuah program yang telah dirancang. Hal ini telah digambarkan dengan

angka presentase sebesar 91%. Begitupula NGO yang menentang digitalisasi desa dengan alasan desa-desa di indonesia belum siap menjadi sebuah tantangan berat yang di gambarkan dengan presentase sebesar 58%. Bagian keempat letak geografis, ini menjadi tantangan pemerintah yang paling berat. Karena akses signal internet yang sulit dan jika ingin membangun sebuah tower provider juga akan tetap terhambat oleh medan pedesaaan. meskipun digitalisasi memberikan solusi alternatif untuk berkomunikasi kepada masyarakat yang secara geografis terisolasi, namun tetap saja sulit. Hal ini di gambarkan dengan presentase sebesar 94%. NGO pun juga berpendapat serupa dengan angka presentase keterlibatan sebesar 55%. Bagian kelima adalah budaya yang presentasenya 100%. Hal ini berartika banyak tantangan bagi pemerintah dalam mewujudkan digitalisasi desa karena budaya tenaga kerja pemerintah dan masyarakat yang acuh dengan perkembangan teknologi.



Gambar 6. Korelasi keterkaitan antar tantangan desa sehat dan sejahtera

Tabel 3. Data Koefisien Korelasi Yang Kuat Antar Tantangan

Korelasi Keterkaitan kuat		Angka Korelasi
Realisasi	Letak Geografis	0,844272
Partisipasi	Realisasi	0,649271
Budaya	Realisasi	0,535336
Regulasi	Partisipasi	0,503317

Hasil analisis korelasi keterkaitan kuat antar tantangan pengembangan digitalisasi desa yang paling tinggi memiliki keterkaitan kuat yaitu realisasi dan letak geografis dengan angka prsentase korelasi 0,84. Untuk merealisasikan digitalisasi desa sangat terhambat oleh letak geografis desa-desa yang terdapat di Indonesia. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa maupun pusat yang tidak dapat dihindari lagi. Terlebih lagi letak geografis juga menjadi sebuah faktor kemiskinan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat sehingga menjadi masalah serius. Namun dalam hal ini keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan

digitalisasi desa dapat sedikit membantu dalam merealisasikan digitalisasi desa, hal ini ditunjukan dengan presentase angka korelasi sebesar 0,64.

Tabel 4. Data Koefisien Korelasi Yang Lemah Antar Tantangan

Korelasi Keterkaitan Lemah		Angka Korelasi
Regulasi	Budaya	0,470931
Regulasi	Letak Geografis	0,439479
Regulasi	Realisasi	0,379766
Partisipasi	Budaya	0,299224
Letak Geografis	Birokrasi	0,192327
Regulasi	Birokrasi	0,136001
Budaya	Birokrasi	0,119575

Hasil analisis korelasi antar tantangan pengembangan digitalisasi desa yang paling lemah yaitu budaya dan birokrasi dengan presentase angka korelasi 0,11. Pengembangan teknologi informasi yang tidak berorientasi pada kebutuhan secara langsung akan mengurangi kebermanfaatan. Karena pengguna yang tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi sesuai kebutuhan, akan semakin memperkokoh budaya apatis terhadap kemajuan teknologi informasi. Kesiapan aparatur desa dengan hadirnya teknologi informasi juga perlu diperkuat. Aparatur desa perlu sadar tentang pemanfaatan teknologi informasi. Sekaligus mengubah pola kerjanya serta pelayanannya yang dulunya berbasis konvesional menjadi berbasis digital. Pergeseran ini perlu proses yang dibangun secara sistemik dengan upaya berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengembangan Digitalisasi Desa di Indonesia terdapat potensi dan tantangan. Potensi pada pengembangan digitalisasi desa yang bertumpu pada Dukungan Pemerintah Pusat, Sumber Daya Manusia, Program Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Otonomi Desa menjadi faktor penting agar program tersebut berjalan lancar. Tantangan pada pengembangan digitalisasi desa yang umum terjadi yaitu Regulasi, Realisai, Partisipasi, Birokrasi, Budaya, dan Letak Geografis. Program digitalisasi desa ini akan memberikan manfaat dalam pengoptimalan system pemerintanhan desa yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya digitalisasi desa mampu menimbulkan potensi peningkatan pelayanan birokrasi.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan khususnya pada Ilmu Pemerintahan dan Administrasi publik yang terkait dengan isu program digitalisasi desa. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemutusan kebijakan pemerintah khususnya di pemerintah desa. Sehingga dalam proses pengembangan digitalisasi desa akan memunculkan suatu sistem pelayanan administratif desa dan pelayanan birokrasi pada pemerintahan desa yang terbuka dan bersih

REFERENSI

Alvaro, R., & Octavia, E. (2019). Desa Digital: Potensi dan Tantangannya Peningkatan Kredit UMKM Melalui Rasio Intermediasi Makroprudensial Tantangan Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. *Buletin DPR*, *IV*(8), 8–11. https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-81.pdf

Ardhana, V. Y. P. (2019). Website Based Village Population Data Information System Sistem Informasi Data Kependudukan Desa Berbasis Web. *SainsTech Innovation Journal*, *2*(2), 1–5. http://jkqh.uniqhba.ac.id/index.php/sij/article/view/99

Ekasari, P., & Hadi Dharmawan, A. (2012). Dampak Sosial-Ekonomi Masuknya Pengaruh Internet Dalam Kehidupan Remaja Di Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *6*(1). https://doi.org/10.22500/sodality.v6i1.5809

Iskandar, A. H. (2021). *Pengembangan Desa Digital*. *6*, 16.

Paryanta, Sutariyani, & Susilowati, D. (2017). Sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web desa Sawahan. *IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering Sistem*, *3*(2), 77–81. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=pengembangan+sistem+administrasi+kelurahan+berbasis+web&btnG%0Ahttps://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ijse/article/viewFile/2980/1929)

Ranade, P., Londhe, S., & Mishra, A. (2015). Smart Villages Through Information Technology – Need of Emerging India. *International Journal of Information Technology (IIJIT)*, *3*(7), 1–6. https://www.researchgate.net/publication/280613118%0A%0Ahttp://www.ipasj.org/IIJIT/IIJIT.htm%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Pinak_Ranade/publication/280613118_SMART_VILLAGES_THROUGH_INFORMATION_TECHNOLOGY_-_NEED_OF_EMERGING_INDIA/links/55beedf008a

Setyaningsih, R., Abdullah, A., Prihantoro, E., & Hustinawaty, H. (2019). Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning. *Jurnal ASPIKOM*, *3*(6), 1200. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.333

Somwanshi, R., Shindepatil, U., Tule, D., Mankar, A., Ingle, N., Rajamanya, G., & Deshmukh, A. (2016). Study and development of village as a smart village. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, *7*(6), 395–408.

Widyawati, E. (2016). Rancang Bangun Aplikasi Kependudukan Berbasis Web Di Desa Kedungrejo Waru-Sidoarjo. *Jurnal Manajemen Informatika*, *6*(1).

Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, D. R. (2013). Desa Digital: Peluang Untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *13*(1), 75–88.

https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1
.158